

BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Sejarah Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Temuan arkeologi di Anyer menunjukkan adanya budaya logam perunggu dan besi sebelum milenium pertama. Gerabah tanah liat prasejarah zaman buni (Bekasi kuna) bisa ditemukan merentang dari Anyer sampai Cirebon. Wilayah Jawa Barat pada abad ke-5 merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanagara. Prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanagara banyak tersebar di Jawa Barat. Ada tujuh prasasti yang ditulis dalam aksara Wengi (yang digunakan dalam masa Palawa India) dan bahasa Sansakerta yang sebagian besar menceritakan para raja Tarumanagara

Setelah runtuhnya kerajaan Tarumanagara, kekuasaan di bagian barat Pulau Jawa dari Ujung Kulon sampai Kali Serayu dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda. Salah satu prasasti dari zaman Kerajaan Sunda adalah prasasti Kebon Kopi II yang berasal dari tahun 932. Kerajaan Sunda beribukota di Pakuan Pajajaran (sekarang kota Bogor). Pada abad ke-16, Kesultanan Demak tumbuh menjadi saingan ekonomi dan politik Kerajaan Sunda. Pelabuhan Cerbon (kelak menjadi Kota Cirebon) lepas dari Kerajaan Sunda karena pengaruh Kesultanan Demak. Pelabuhan ini kemudian tumbuh menjadi Kesultanan Cirebon yang memisahkan diri dari

Kerajaan Sunda. Pelabuhan Banten juga lepas ke tangan Kesultanan Cirebon dan kemudian tumbuh menjadi Kesultanan Banten.

Untuk menghadapi ancaman ini, Sri Baduga Maharaja, raja Sunda saat itu, meminta putranya, Surawisesa untuk membuat perjanjian pertahanan keamanan dengan orang Portugis di Malaka untuk mencegah jatuhnya pelabuhan utama, yaitu Sunda Kalapa(sekarang Jakarta) kepada Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak. Pada saat Surawisesa menjadi raja Sunda, dengan gelar Prabu Surawisesa Jayaperkosa, dibuatlah perjanjian pertahanan keamanan Sunda-Portugis, yang ditandai dengan Prasasti Perjanjian Sunda-Portugal, ditandatangani dalam tahun 1512. Sebagai imbalannya, Portugis diberi akses untuk membangun benteng dan gudang di Sunda Kalapa serta akses untuk perdagangan di sana. Untuk merealisasikan perjanjian pertahanan keamanan tersebut, pada tahun 1522 didirikan suatu monumen batu yang disebut *padrão* di tepi Ci Liwung.

Meskipun perjanjian pertahanan keamanan dengan Portugis telah dibuat, pelaksanaannya tidak dapat terwujud karena pada tahun 1527 pasukan aliansi Cirebon - Demak, dibawah pimpinan Fatahilah atau Paletahan menyerang dan menaklukkan pelabuhan Sunda Kalapa. Perang antara Kerajaan Sunda dan aliansi Cirebon - Demak berlangsung lima tahun sampai akhirnya pada tahun 1531 dibuat suatu perjanjian damai antara Prabu Surawisesa dengan Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon.

Dari tahun 1567 sampai 1579, dibawah pimpinan Raja Mulya, alias Prabu Surya Kencana, Kerajaan Sunda mengalami kemunduran besar dibawah tekanan Kesultanan Banten. Setelah tahun 1576, kerajaan Sunda tidak dapat mempertahankan

Pakuan Pajajaran (ibukota Kerajaan Sunda), dan akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Banten. Zaman pemerintahan Kesultanan Banten, wilayah Priangan (Jawa Barat bagian tenggara) jatuh ke tangan Kesultanan Mataram.

Jawa Barat sebagai pengertian administratif mulai digunakan pada tahun 1925 ketika Pemerintah Hindia Belanda membentuk Provinsi Jawa Barat. Pembentukan provinsi itu sebagai pelaksanaan Bestuurs hervormingwet tahun 1922, yang membagi Hindia Belanda atas kesatuan-kesatuan daerah provinsi. Sebelum tahun 1925, digunakan istilah Soendalanden (Tatar Soenda) atau Pasoendan, sebagai istilah geografi untuk menyebut bagian Pulau Jawa di sebelah barat Sungai Cilosari dan Citanduy yang sebagian besar dihuni oleh penduduk yang menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa ibu.

Pada 17 Agustus 1945, Jawa Barat bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1949 Jawa Barat menjadi Negara Pasundan yang merupakan salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar: Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai perwakilan PBB. Jawa Barat kembali bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1950.

3.1.2 Visi Misi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat

Visi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat

"Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua" Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Maju : adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.

Sejahtera : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan. Untuk Semua : adalah kondisi dimana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat

Misi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat

Misi Pertama, Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Masyarakat Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya IPTEK, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi. Misi Kedua, Membangun Perekonomian yang

Kokoh dan Berkeadilan. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Perekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) serta menerapkan model manajemen pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis kabupaten/kota dengan manajemen lintas kabupaten/kota.

Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Pembangunan Jawa Barat yang selaras dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur dasar yang memadai, serta didukung oleh tersedianya infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi.

Misi Kelima, Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Kehidupan sosial

kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal.

3.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 3. 1 : Struktur Organisasi

(Sumber : <http://diskominfo.jabarprov.go.id> [7])

3.1.4 Deskripsi Tugas

1. Sekretariat Daerah

Melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi.

2. Kepagawaian

Fungsi dari Bagian Kepegawaian antara lain :

1. Melaksanakan Rencana Penerimaan, Penempatan dan Pemberhentian
2. Mengelola pegawai sesuai kebutuhan organisasi
3. Melakukan pengawasan terhadap Disiplin Pegawai
4. Melakukan evaluasi semua kegiatan sesuai rencana
5. Memberikan laporan kegiatan sesuai hasil evaluasi

3. Keuangan

1. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan keuangan
2. Pelaksanaan tugas teknis pengelolaan keuangan dan asset daerah yang meliputi anggaran,perbendaharaan,pemberdayaan asset dan akuntansi.
3. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi dinas

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Perencanaan dan Program

Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas perencanaan, penyusunan program kerja, penyusunan anggaran, memverifikasi usulan rencana kerja anggaran.

5. Sandi dan telekomunikasi

1. Menyelenggarakan pelayanan kirim/terima berita atau surat biasa/plain dan sandi/kode
2. Menyelenggarakan pelayanan kirim/terima berita atau surat melalui sarana komunikasi facsimile, radio, email
3. Melakukan pengamanan signal dalam ruang kerja dan ruang rapat pimpinan
4. Melakukan sterilisasi ruang kerja dan ruang rapat pimpinan

6. Pusat komando dan pengendalian

1. Pengendalian dan mengawasi seluruh kerjanya para pegawai
2. Pengaman dan pengendali semua sistem yang ada di pemerintah

3.2 Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian dalam bidang sistem informasi tidak berbeda dengan pada bidang yang lain. Yang membedakan sebenarnya lebih pada tradisi penelitian yang dilakukan dan disepakati oleh komunitas sistem informasi dunia.

3.2.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam perancangan sistem informasi pengelolaan proposal di Sekretariat Pemerintah Jawa Barat .metode desain penelitian yang digunakan ialah Historikal riset dilakukan dengan membaca buku-buku dan literatur serta mengikuti pola dari literatur maupun buku yang kita baca. Penelitian ini memerlukan history atau sejarah awal pertama terbentuknya topik yang ingin kita cari. Pada umumnya history atau sejarah tersebut tidak terekam sifatnya tidak autentik.

3.2.2 Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Jenis metode pengumpulan yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau dari objek yang dianalisis, baik itu dengan wawancara, observasi, kuisisioner. Peneliti melakukan analisis dengan observasi secara langsung dan juga dengan melakukan wanwancara dengan ketua yayasan tersebut. Selain data primer, analisis juga dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku-buku, artikel dan media cetak. Pengumpulan data sekunder ini, dilakukan melalui kegiatan studi kepustakaan dan studi literatur sejenis.

3.2.2.1 Sumber Data Primer

1. Observasi

Mendeskripsikan mengenai tentang pengamatan terhadap kegiatan dalam Sekretariat Pemerintah Daerah Jawa barat. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dalam proses pegajuan pengelolaan proposal yang dilakukan oleh pihak diluar pemerintah yang mengajukan kepada pemerintah. Selanjut peneliti melihat proses tersebut sudah terkomputerisasi atau belum sama sekali menggunakan komputer.

2. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan sebuah informasi yang pasti dan tepat. wawancara dilakukan langsung datang dari sumbernya. Penulis dapat menggali lebih banyak lagi data dan informasi prosedur yang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

3. Dokumentasi

Teknik ini merupakan teknik pendokumentasian berbagai catatan lapangan dan pendokumentasian visual (photo), tujuannya untuk menghasilkan data pelengkap penelitian. Selain itu penulis memotret beberapa dokumen-dokumen yang terlibat dalam sistem yang sedang berjalan di yayasan tersebut.. Tujuan dari dokumenasi ini adalah untuk mempertegas data hasil observasi dan wawancara.

3.2.2.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini diperoleh dari jurnal, buku-buku, artikel dan media cetak. Pada sumber data sekunder ini penulis mengumpulkan data untuk mencari dan menganalisis data-data yang sejenis dengan tema yang diambil melalui pencarian berbagai dokumen baik yang tercetak berupa tulisan dan gambar maupun sumber-sumber digital lainnya, seperti: catatan, buku, koran, majalah, internet. Tujuannya ialah untuk mendapatkan data akurat yang berhubungan dengan tema yang akan dibahas didalam tugas akhir ini.

3.2.3 Metode Pendekatan dan Pengembangan Sistem

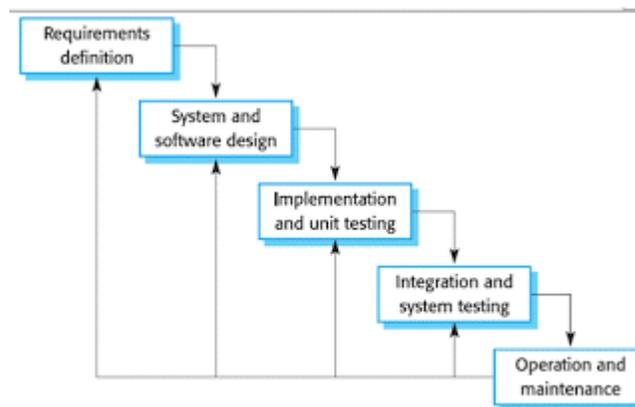
Metode pendekatan dan pengembangan sistem dilakukan untuk membantu pengembangan sistem informasi pengelolaan proposal berbasis web dengan metode pendekatan sistem.

3.2.3.1 Metode Pendekatan Sistem

Metode pendekatan sistem yang digunakan dalam perancangan sistem informasi pengelolaan proposal menggunakan metode terstruktur.dengan alat bantu ,aliran dokumen diagram alir dokumen (flowmap), diagram konteks, diagram alir data (DFD), kamus data dan tabel relasi. Sebelum menganalisis, ada beberapa langkah dasar yang dilakukan dalam perancangan sebuah sistem, yaitu: mengidentifikasi masalah, memahami sistem yang sedang berjalan di pemerintah provinsi jawa barat dibagian Sekretariat Daerah untuk pengelolaan proposal.

3.2.3.2 Metode Pengembangan Sistem

Pengembangan Website Sistem Informasi Pengelolaan Proposal ini menggunakan metode sekuensial liner (waterfall). Waterfall adalah suatu metodologi pengembangan perangkat lunak yang mengusulkan pendekatan kepada perangkat lunak sistematis dan sekuensial yang mulai pada tingkat kemajuan sistem pada seluruh analisis, design, kode, pengujian dan pemeliharaan. Langkah-langkah yang harus dilakukan pada metodologi Waterfall adalah sebagai berikut :



Gambar 3.2 WaterFall

Sumber : Metode Waterfall (Sommerfille, 2010 [8])

A. Analisis kebutuhan perangkat lunak

Proses pengumpulan kebutuhan diintensifkan dan difokuskan, khususnya pada perangkat lunak. Untuk memahami sifat program yang dibangun, rekayasa perangkat

lunak (analisis) harus memahami domain informasi, tingkah laku, unjuk kerja dan antar muka (interface) yang diperlukan. Kebutuhan baik untuk sistem maupun perangkat lunak di dokumentasikan dan dilihat dengan pelanggan.

B. Desain

Desain perangkat lunak sebenarnya adalah proses multi langkah yang berfokus pada empat atribut sebuah program yang berbeda; struktur data, asitektur perangkat lunak, representasi interface dan detail (algoritma) prosedural. Proses desain menerjemahkan syarat/kebutuhan kedalam sebuah representasi perangkat lunak yang dapat di perkirakan demi kualitas sebelum dimulai pemunculan kode. Sebagaimana persyaratan, desain didokumentasikan dan menjadi bagian dari konfigurasi perangkat lunak.

C. Generasi Kode

Desain harus diterjemahkan dalam bentuk mesin yang bisa di baca. Langkah pembuatan kode melakukan tugas ini. Jika desain dilakukan dengan cara yang lengkap, pembuatan kode dapat diselesaikan secara mekanis.

D. Pengujian

Proses Pengujian dilakukan pada logika internal untuk memastikan semua pernyataan sudah diuji. Pengujian eksternal fungsional untuk menemukan kesalahan-

kesalahan dan memastikan bahwa input akan memberikan hasil yang aktual sesuai yang dibutuhkan.

E. Pemeliharaan

Pemeliharaan suatu software diperlukan, termasuk di dalamnya adalah pengembangan, karena software yang dibuat tidak selamanya hanya seperti itu ketika dijalankan mungkin saja masih ada error kecil yang tidak ditemukan sebelumnya atau ada penambahan fitur-fitur yang belum ada pada software tersebut. Pengembangan diperlukan ketika adanya perubahan dari eksternal perusahaan seperti ketika ada pergantian sistem operasi, atau perangkat lainnya.[16]

3.2.3.3 Alat Bantu Analisis Perancangan

Beberapa alat bantu (tools) yang digunakan untuk menganalisis dan merancang sistem informasi Pengelolaan Proposal adalah sebagai berikut:

1. Diagram Alir Dokumen (Flowmap)

Diagram Alir Dokumen (Flowmap) digunakan untuk menganalisis alur dokumen dari prosedur sistem informasi pengelolaan proposal.

2. Diagram Konteks

Diagram konteks digunakan untuk memberi gambaran tentang keseluruhan sistem informasi pengelolaan . Diagram konteks juga menggambarkan ruang lingkup sistem prosedur yang terjadi disekretariat daerah provinsi jawa barat.

3. Diagram Alir Data (Data Flow Diagram)

Data Flow Diagram digunakan untuk menggambarkan model dari sistem informasi pengolahan proposal ke modul-modul yang lebih kecil. Tujuannya agar memudahkan user yang kurang menguasai bidang komputer untuk mengerti sistem yang nantinya akan dikerjakan. Pada perancangan sistem informasi pengelolaan proposal pembuatan Data Flow Diagram, digambarkan sampai tahap level terkecil.

4. Kamus Data

Penggunaan kamus data adalah untuk mendefinisikan data yang mengalir di sistem informasi pengelolaan proposal dengan lengkap. Kamus data berisi fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari sistem pengelolaan proposal yang akan dirancang.

5. Perancangan Basis Data

Perancangan basis data adalah langkah untuk membuat basis data yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada sistem informasi pengelolaan proposal yang akan dirancang, perancangan basis data digambarkan dengan membuat normalisasi dan tabel relasi.

3.3 Analisis Sistem Yang Berjalan

3.3.1 Analisis Dokumen

Analisis dokumen dilakukan untuk mengetahui apakah data-data yang ada pada prosedur kerja sistem sudah cukup baik dalam menghasilkan informasi yang

dibutuhkan. Data yang dihasilkan dalam suatu sistem harus jelas, konsisten dan tidak terdapat redudansi data.

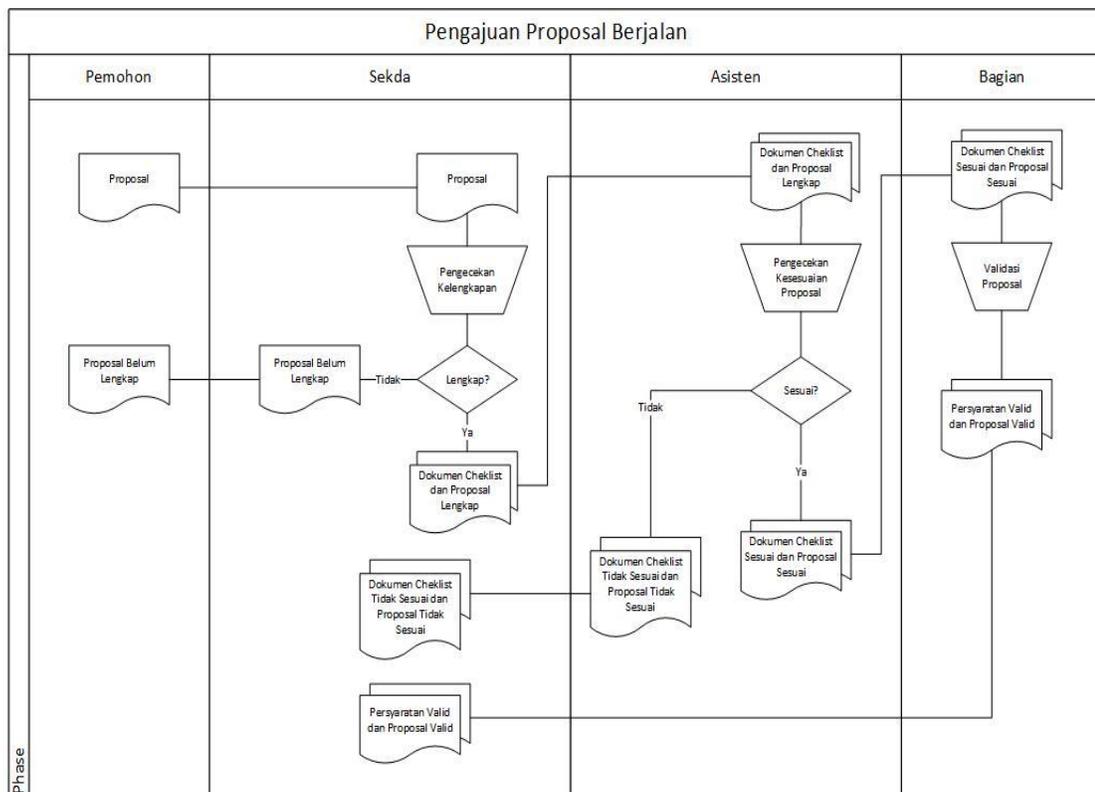
3.3.2 Analisis Prosedur yang sedang berjalan

1. Pemohon memberikan dokumen pengajuan proposal kepada instansi pemerintahan daerah provinsi jawa barat pada bagian sekretariat daerah .
2. Pemohon juga wajib menyerahkan persyaratan berkas untuk mengajukan proposal kepada pihak instansi.
3. Sekretariat akan memeriksa kelengkapan dari persyaratan pemohon ,bila persyaratan tersebut sudah terpenuhi maka bagian sekretarian akan memberikan proposal tersebut sesuai bagian yang di butuhkan kepada Bagian Asisten pemerintah yang sesuai dengan isi proposal dan menunggu persetujuan .apabila tidak sesuai maka bagian sekretariat akan mengembalikan hasil proposal tersebut ke pemohon agar memenuhi persyaratan yang kurang atau belum terpenuhi.
4. Bagian Asisten akan mengecek ulang isi proposal tersebut dengan mengecek maksud dari isi proposal tersebut jika proposal sesuai maka Bagian Asisten Akan memberikan hasil proposal tersebut kepada bagian biro untuk di validasi apakah bisa diterima apa tidak ? proposal yang akan di ajukan .jika ternyata tidak sesuai dan ada yang salah dalam isi proposal tersebut maka pihak Bagian Asisten akan memberitahu bagian sekretariat untuk menolak proposal tersebut dengan membrikan keterangan.
5. Bagian biro akan menyeleksi ulang proposal tersebut dan mempertimbangkan hasil proposal tersebut jika diterima maka bagian biro akan memberikan dokumen ke

bagian sekretariat daerah bahwa proposal tersebut disetujui dan bagian sekretariat akan memberitahukan bahwa proposal tersebut sudah di validasi oleh 2 instansi sebelumnya

3.3.2.1 Diagram Alir Dokumen(Flow Map)

Diagram alir dokumen merupakan suatu model diagram yang berisikan istilah atau pengertian mengenai langkah-langkah pencatatan, penganalisisan dan pengkoordinasian informasi. Diagram ini juga menjelaskan suatu alur dokumen dari prosedur suatu sistem.



Gambar 3. 2: Flow Map

3.3.2 Evaluasi Sistem Yang Sedang Berjalan

No	Sistem yang sedang berjalan	Solusi
1	Sistem yang berjalan masih sangat rentan akan kesalahan	Membuat sistem informasi pengajuan proposal berbasis web
2	Sistem pengajuan proposal masih dilakukan secara manual, sehingga memperlambat proses pengajuan proposal	Dengan sistem informasi pengajuan proposal dapat mempersingkat waktu pengajuan

Table 3.1: Evaluasi Sistem yang Berjalan